BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Banten Pada Tahun 2015-2024" maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB di Provinsi Banten belum sepenuhnya mampu menekan kesenjangan distribusi pendapatan, karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Tingkat pengangguran juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten pada tahun 2015-2024. Artinya, kenaikan upah minimum secara nyata mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan ini cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan secara tidak langsung membantu menciptakan distribusi pendapatan yang adil.
3. Upah minimum terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, kenaikan upah minimum secara nyata mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan ini cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan secara tidak langsung membantu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.
4. Dummy Pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menandakan bahwa pandemic covid-19 memberikan dampak nyata dalam memperlebar ketimpangan, terutama akibat terhentinya aktivitas ekonomi dan ketidakmerataan daya tahan sector ekonomi di masing-masing daerah.
5. Secara simultan, Variabel PDRB, tingkat pengangguran, dan upah minimum, berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

Provinsi Banten. Hal ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor, baik ekonomi makro maupun kejadian luar biasa seperti pandemi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan temuan dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Banten, perlu adanya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif agar pertumbuhan PDRB dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan investasi, peningkatan akses pendidikan, serta pemberdayaan sektor ekonomi lokal perlu menjadi prioritas.
2. Kebijakan pengurangan pengangguran perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah perlu memperkuat program penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya di sektor pekerjaan formal. Selain itu, penguatan UMKM juga penting dilakukan untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lokal dan mempersempit jurang ketimpangan.
3. Kebijakan upah minimum terbukti efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun UMK hendaknya mempertimbangkan kebutuhan hidup kayak (KHL), tingkat inflasi, serta kondisi perekonomian daerah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan penyesuaian upah disinergikan dengan program bantuan sosial yang tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar – benar dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah.
4. Dalam menghadapi krisis seperti pandemi, pemerintah perlu memiliki skema perlindungan sosial yang lebih Tangguh dan tepat sasaran. Program bantuan tunai, jaminan sosial, dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil harus lebih cepat dan fleksibel dalam pelaksanaanya, agar tidak memperdalam ketimpangan yang sudah ada.
5. Penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain seperti indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, atau

distribusi sector industri untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait penyebab kitmpangan pendapatan di daerah.